

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPPKP KABUPATEN SIAK**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Analisa isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah disektor pertanian, perikanan dan kehutanan dari 3 (tiga) kementerian yang mempengaruhi sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan serta perkembangan yang terjadi di Kabupaten Siak khususnya dan Propinsi Riau umumnya selama pelaksanaan pembangunan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 5 (lima) tahun terakhir (2011-2016). Oleh karena itu, Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak berfungsi untuk mengkoordinasikan program/kegiatan ke 3(tiga) Kementerian tersebut demi mencapai sasaran program/kegiatan yang optimal sehingga tercapai Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Siak saat ini antara lain :

- Pengetahuan, sikap, dan keterampilan SDM pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah;
- Adopsi inovasi teknologi (pertanian, perikanan dan kehutanan) pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah;
- Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha;
- Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan;
- Peranan penyuluh dalam pendampingan petani dalam Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
- Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan nasional, propinsi dan kabupaten;
- Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
- Masih terbatasnya jumlah sumberdaya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan;

- Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga;
- Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor pola pangan harapan yang ideal;
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
- Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang;
- Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kabupaten;
- Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi;

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### ***Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih***

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2011-2016 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

**“Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu di Indonesia yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025”.**

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Indonesia melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya;
2. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal;
3. Membina sektor agribisnis, agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, berwibawa dan menjunjung tinggi norma- norma adat, agama dan hukum;
5. Menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
6. Memenuhi kebutuhan dasar dan hak sosial-politik masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis dan berbudaya.



## ***Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih***

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. **Pengembangan sumber daya manusia yang mandiri dan produktif,** Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang harus dibina dan diberdayakan dalam mengisi pembangunan daerah. Upaya pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana di bidang tersebut. Melalui pengembangan SDM, diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran seiring dengan meningkatnya kualitas, kemandirian dan produktifitas masyarakat
2. **Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing,** Sektor pertanian dalam arti luas dan pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa menjadi beberapa alternatif daya ungkit perekonomian Siak kedepan. Hasil-hasil pertanian tidak hanya dipasarkan dalam bentuk mentah namun juga diolah dan dikemas dengan baik melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis serta keterlibatan dan pemberdayaan UMKM. Sejalan dengan itu, pengembangan perekonomian Siak juga diarahkan untuk memperkuat dan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelibatan semua pelaku ekonomi secara sinergi diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Siak sehingga dapat menangkap peluang yang ada.
3. **Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,** Pembangunan Kabupaten Siak di satu sisi berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentu saja mengejar aspek ekonomi, namun di sisi lain juga tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal lain yang perlu mengemuka terkait pembangunan berkelanjutan yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Salah satu hal yang dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yaitu percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan penetapan RTRW, maka pembangunan harus memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.



4. **Pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya Melayu dan nilai-nilai keagamaan,** Potensi dan peluang sektor pariwisata di Kabupaten Siak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) objek wisata, yaitu: objek wisata sejarah, objek wisata alam, objek wisata budaya, dan objek wisata buatan. Melalui Istana Siak sebagai pusat budaya Melayu, pembangunan kedepan juga diarahkan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu. Pengembangan wisata budaya di Siak juga didukung oleh 25 cagar budaya. Pengembangan dan pelestarian budaya Melayu sangat didukung oleh kebijakan provinsi. Pengembangan kebudayaan melayu di Kabupaten Siak untuk mewujudkan *Siak The Truly Malay*. Selain menjaga nilai-nilai budaya dan keagamaan yang erat kaitannya dengan budaya Melayu, potensi ini dijadikan salah satu komoditi yang dipasarkan untuk menarik industri pariwisata di Siak. Kedepan, dengan warisan budaya Melayu dan nilai-nilai keagamaan yang kuat sangat memungkinkan untuk mengembangkan *Moslem Friendly Tourism (MFT)*.
5. **Pengembangan Kecamatan Sesuai Potensi dan Karakteristiknya,** Dengan potensi dan karakteristik yang cenderung berbeda, maka pengembangan masing-masing kecamatan dapat diarahkan secara berbeda, antara lain untuk pariwisata, industri, pertanian dan lain-lain. Pengembangan kecamatan dengan fokus yang berbeda-beda diharapkan dapat saling melengkapi satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.
6. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan professional,** Guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dan pemerintah desa, maka salah satu isu Kabupaten Siak lima tahun kedepan adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Penataan dan pengembangan tata kelola pemerintahan ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

#### ***Visi Kementerian Pertanian***

Adapun Visi Kementerian Pertanian adalah " **Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**".

#### ***Misi Kementerian Pertanian***

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat;



2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi;
3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani;
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi adalah Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

### ***Tujuan Kementerian Pertanian***

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

### ***Sasaran Kementrian Pertanian***

Selama lima tahun ke depan (2015-2019), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 6 (enam) target utama, yaitu:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau**

##### ***Visi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau***

Visi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau adalah "Mewujudkan Penyelenggaraan Penyuluhan yang profesional, berkelanjutan dan terpadu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berwawasan lingkungan".



### ***Misi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau***

1. Meningkatkan kemampuan penyuluh untuk mewujudkan kondisi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang tangguh, modern dan berwawasan Lingkungan.
2. Mendorong partisipasi dan kerjasama dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pakar dan pemerhati untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan.
3. Berperan serta meningkatkan efektifitas, efisiensi keterpaduan dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

### ***Tujuan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau***

1. Agar dapat mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang profesional dan berkelanjutan;
2. Agar dapat mewujudkan percontohan kelompok Tani/Nelayan Sejahtera, Teladan dan Berprestasi;
3. Agar dapat mewujudkan sarana dan prasarana penyuluhan berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mutakhir yang berkualitas, serta dengan mewujudkan sistem penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

### ***Sasaran Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau***

1. Terselenggaranya penyuluhan yang profesional dan berkarakter, untuk mencapai dan mewujudkan:
  - a. Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan
  - b. Meningkatnya peran penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam pelaksanaan Dempam/Demplot.
  - c. Meningkatnya peran penyuluh dalam mengkaji standar penyelenggaraan penyuluhan.
  - d. Adanya pengembangan bahan informasi penyuluhan
2. Terlaksananya Percontohan Kelompok Tani/Nelayan Sejahtera, Teladan dan Berprestasi, untuk mewujudkan:
  - a. Meningkatnya kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.
  - b. Penghargaan terhadap Kelompok Tani Teladan dan Berprestasi
  - c. Meningkatnya fungsi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang berkualitas, untuk mewujudkan:
  - a. Database penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang efektif dan mutakhir.
  - b. Database sarana dan prasarana serta kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
  - c. Meningkatkan fungsi kelembagaan penyuluhan dalam pengembangan sistem penyuluhan.



- d. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penyuluhan.
- 4. Terselenggaranya sistem penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien, untuk mewujudkan :
  - a. Tersusunnya program penyuluhan dan rencana teknis penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
  - b. Meningkatnya penerapan sistem dan metode penyuluhan.
  - c. Berkembangnya bahan informasi dan materi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
  - d. Meningkatnya peranan PEMDA dalam memfasilitasi dan mendorong peran pelaku utama dan pelaku usaha.
  - e. Berkembangnya kerjasama penyuluh antar kelembagaan penyuluhan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
  - f. Berkembangnya peran penyuluhan swadaya dan penyuluh swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan ditingkat lapangan.
  - g. Meningkatnya mutu pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan formasi dan materi penyuluhan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Hal penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKP adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian beririgasi secara kurang terkendali sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Siak untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Sedangkan isu yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran sumberdaya air dan masih terdapatnya lahan-lahan kritis di Kabupaten Siak. Disamping itu tumbuhnya permukiman penduduk dengan semua aktifitasnya pada bantaran sungai/anak sungai, sempadan irigasi dan sekitar saluran drainase berdampak pada terganggunya fungsi sarana-prasarana wilayah.

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi/kabupaten/kota. Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

- a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup :
  - 1) Luas dan batas wilayah administrasi;
  - 2) Letak dan kondisi geografis
  - 3) Topografi,
  - 4) Geologi,
  - 5) Hidrologi,



- 6) Klimatologi
- 7) Pengguna lahan

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik, dan vulkanik dan lain-lain.

d. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat menunjuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

Kabupaten Siak terletak diantara 1<sup>o</sup>16'30" LU sampai dengan 0<sup>o</sup>20'49" dan 100<sup>o</sup>54'21" BT sampai dengan 102<sup>o</sup>10'59" BT, dengan luas wilayah mencapai 8.556,09 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Siak mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan.

Beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25<sup>o</sup>-32<sup>o</sup> Celsius. Selain dikenal dengan sungai siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

Akhir tahun 2007 Wilayah Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 13 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Mempura
3. Kecamatan Dayun
4. Kecamatan Bung Raya
5. Kecamatan Sungai Mandau



6. Kecamatan Sungai Apit
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Minas
9. Kecamatan Kandis
10. Kecamatan Tualang
11. Kecamatan Koto Gasib
12. Kecamatan Kerinci Kanan
13. Kecamatan Lubuk Dalam
14. Kecamatan Pusako

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi disebelah barat. Jenis tanah pada umumnya terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning dari batuan Metamorf, Alluvial, tanah Organosol dan Gley Humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah serta sebagian kecil Latosol. Kabupaten Siak merupakan daerah lahan gambut dan sangat rentan terhadap kebakaran lahan pada musim kemarau. Sehingga Kabupaten Siak juga sudah merupakan salah satu hot spot di Indonesia, karena merupakan langganan kebakaran setiap musim kemarau.

*a. Penggunaan Lahan*

Berdasarkan interpretasi peta tutupan lahan tahun 2009, penggunaan lahan dominan di Kabupaten Siak saat ini adalah perkebunan sebesar 45,27% dan hutan sebesar 39,35%. Sebaran penggunaan lahan perkebunan terbesar terletak di Kecamatan Kandis, sedangkan sebaran penggunaan lahan hutan terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Mandau dan Sungai Apit.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009, pada pasal 18 sampai pasal 20 di sebutkan bahwa penetapan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelamatkan lahan sawah seluas 8.499 Ha agar tetap menjadi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Siak harus memiliki Rencana Tata Ruang Kabupaten dan telah menetapkan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalamnya.

*b. Kesesuaian Lahan*

Kesesuaian lahan di Kabupaten Siak dilakukan berdasarkan kesesuaian aktual yaitu kesesuaian lahan yang ada saat ini sebelum dilakukan aktifitas perbaikan atau pengurangan kendala yang ada. Kondisi kesesuaian lahan tersebut dievaluasi berdasarkan data fisik lingkungan dan kualitas tanah pada setiap satuan peta tanah (SPT). Penilaian evaluasi



kesesuaian lahan dilakukan pada masing-masing SPT dan ditujukan untuk masing-masing penggunaan lahan bagi komoditi pertanian di Kabupaten Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2014 berjumlah **471.330** jiwa, terdiri atas laki-laki 245.429 jiwa dan perempuan 225.901 jiwa

**Tabel 3.1.** Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2014 Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (km)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
1.	Minas	16.737	15.202	31.939	346,35	92,22
2.	Kandis	42.873	39.476	82.349	1.493,65	55,13
3.	Siak	14.209	13.339	27.548	894,17	30,81
4.	Sungai Apit	15.983	14.946	30.929	1.346,33	22,97
5.	Sungai Mandau	3.837	3.608	7.445	1705	4,37
6.	Kerinci Kanan	13.556	12.271	25.827	128,66	200,74
7.	Lubuk Dalam	20.777	10.023	20.800	155,09	134,12
8.	Tualang	66.102	60.340	126.442	343,6	367,99
9.	Koto Gasib	12.093	11.395	23.488	704,7	33,33
10.	Dayun	17.052	15.539	32.591	232,24	140,33
11.	Bunga Raya	13.669	12.493	26.192	151	173,46
12.	Mempura	8.424	7.899	16.323	437,45	37,31
13.	Sabak Auh	6.622	6.167	12.789	73,38	174,28
14.	Pusako	3.465	3.203	6.668	544,47	12,25
<b>Jumlah 2014</b>		<b>245.429</b>	<b>225.901</b>	<b>471.330</b>	<b>8.556,09</b>	<b>55,17</b>

Sumber: LKPJ Kabupaten Siak 2014

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Belum optimalnya kelembagaan petani sebagai wadah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok;
2. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
3. Penempatan tenaga penyuluh belum sesuai dengan potensi wilayah;
4. Kurangnya sarana prasarana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.
5. Belum optimalnya produksi bahan pangan;
6. Masih terdapat daerah potensi rawan pangan di beberapa wilayah;
7. Belum merata nya akses dan distribusi pangan;
8. Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal;



9. Belum terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman yang diidentifikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021, sehingga diperlukan sosialisasi diversifikasi pangan;
10. Belum optimalnya peran kelembagaan ketahanan pangan;
11. Semakin maraknya ahli fungsi lahan dari lahan pangan ke subsektor lainnya.

